

Bantuan Kesehatan dari Pemprov Sulsel untuk Korban Longsor di Tana Toraja Telah Diterima Pemda untuk Disalurkan



Sumber gambar:

<https://bukamatanews.id/read/2024/04/16/bantuan-kesehatan-dari-pemprov-sulsel-untuk-korban-longsor-di-tana-toraja-telah-diterima-pemda-untuk-disalurkan>

Dalam upaya tanggap bencana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan bantuan kepada korban tanah longsor di Tana Toraja. Penyerahan bantuan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sulsel ke Dinas Kesehatan Tana Toraja pada hari Selasa, 16 April 2024, di Palangka, Kecamatan Makale.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Tana Toraja, Yosefina Rombetasik, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, termasuk Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. "Kami mengapresiasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel atas perhatian dan dukungan yang diberikan melalui bantuan ini," kata Yosefina.

Bantuan yang disalurkan mencakup 20 dos Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI), 40 dos biskuit untuk Ibu Hamil (Bumil), serta paket obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh para korban bencana.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Muhammad Ishaq Iskandar, menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Tana Toraja dan timnya dalam upaya membantu para korban. Ia juga menyatakan bahwa laporan kondisi terkini telah terus disampaikan ke pusat krisis kesehatan dan Kementerian Kesehatan. "Sebagai bagian dari layanan kesehatan bencana, telah mendirikan tiga pos kesehatan lapangan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dan petugas yang memerlukan layanan kesehatan," jelas Ishaq Iskandar.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Lebih lanjut, ia menyebutkan penanganan bencana tanah longsor di Tana Toraja ini menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan provinsi dalam menghadapi situasi darurat. "Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban para korban dan mendukung pemulihan kondisi kesehatan mereka," tandasnya.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui program Pertamina Peduli, tak henti-hentinya menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban terdampak bencana alam yang akhir-akhir sering terjadi. Kali ini bantuan disalurkan untuk korban terdampak bencana longsor yang terjadi di Desa Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Tana Toraja, pada Selasa, 16 April 2024.

Longsor terjadi dari bukit dengan ketinggian sekitar satu kilometer dan menimpa rumah warga yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 20 orang. Mengetahui informasi tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sigap mengirimkan bantuan berupa LPG Bright Gas 12 KG sebanyak lima tabung, mi instan 20 dus, telur 15 rak, air mineral 600 ml sebanyak 20 dus, beras 30 sak, minyak goreng 15 liter, teh celup 15 dus, gula pasir 10 kg, dan susu UHT sebanyak dua dus yang diserahkan ke dapur umum Kementerian Sosial RI untuk kemudian disalurkan ke korban terdampak longsor.

Kepala Dinas Sosial Tana Toraja, drg Adriana Saleng, mengapresiasi kepedulian PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terhadap korban bencana longsor Toraja.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw, memastikan bahwa pendistribusian BBM dan LPG di lokasi kejadian tidak mengalami kendala. Pihaknya juga terus memonitoring ketersediaan stok energi tercukupi. Selain penyerahan bantuan ke dapur umum Kementerian Sosial, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi juga mengunjungi langsung ke RS Sinar Kasih Toraja tempat korban dirawat untuk diberikan santunan.

Sumber Berita :

1. <https://bukamatanews.id/read/2024/04/16/bantuan-kesehatan-dari-pemprov-sulsel-untuk-korban-longsor-di-tana-toraja-telah-diterima-pemda-untuk-disalurkan> 16 April 2024.
2. <https://harian.fajar.co.id/2024/04/16/pertamina-patra-niaga-sulawesi-sigap-salurkan-bantuan-untuk-korban-terdampak-bencana-longsor-toraja/2/> 16 April 2024.

Catatan :

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 yang menyatakan:
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - c. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - d. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - 1) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - 2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - f. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 - g. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - h. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

- i. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 - j. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.